PERKEMBANGAN DAN PELUANG KERJASAMA BILATERAL INDONESIA - MALAYSIA

DEPARTEMEN PERTANIAN

Bibliografi

PERKEMBANGAN DAN PELUANG KERJASAMA BILATERAL INDONESIA – MALAYSIA

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEPARTEMEN PERTANIAN

341 (910: 595)
Dep
P
16.908 5

(919.99)

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT ...
No : 2.152
TGL. :
KEMENTERIAN PE

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
No: 16.908
TGL:
DEPARTEMEN PERTANIAN

DEPARTEMEN PERTANIAN RI

2001

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya **Buku Perkembangan dan Peluang Kerjasama Bilateral Indonesia – Malaysia**. Semoga buku ini bermanfaat dan dapat memberikan tambahan wawasan dalam membangun kerjasama secara bilateral dengan negara tersebut.

Buku kecil ini merupakan kumpulan informasi awal tentang kerjasama bilateral yang berisikan: keadaan umum negara Malaysia, potensi sumberdaya alam dan pertanian yang dimiliki, perkembangan kerjasama bilateral dengan Indonesia dan peluang kerjasama yang perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang. Buku ini merupakan salah satu judul dari 35 judul Buku Perkembangan dan Peluang Kerjasama Bilateral dan Regional yang disusun oleh Bagian Proyek Peningkatan Kerjasama Luar Negeri, Biro Kerjasama Luar Negeri Departemen Pertanian untuk tahun 2001.

Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih yang dalam atas kerja keras tim kecil yang telah menyusun 35 judul buku dalam waktu singkat diantara kesibukan tugas sehari-hari.

Kami menyadari keterbatasan data dan informasi yang didapat, analisis yang masih dangkal serta kemampuan membuat narasi dalam kurun waktu yang sangat terbatas. Untuk itu dengan rendah hati kami mengharapkan masukan dari pembaca guna penyempurnaan buku ini pada saat mendatang.

Mudah-mudahan buku ini dapat menjadi salah satu rujukan dalam menentukan langkah kerjasama bilateral dengan negara Malaysia.

Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri

Ir. P. Natigor Siagian

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR iii

TIM PENYUSUN iv

I. KEADAAN UMUM 1

1.1. Sejarah Singkat 1
1.2. Politik dan Pemerintahan 2
1.3. Sosial Ekonomi 7

II. POTENSI NEGARA 11

2.1. Keadaan Geografis 11
2.2. Potensi Alam dan Pertanian 13

III. PERKEMBANGAN KERJASAMA 15

3.1. Kerjasama Bidang Politik 15
3.2. Kerjasama Bidang Ekonomi 18
3.3. Kerjasama Teknik 21

IV. PELUANG KERJASAMA 25

LAMPIRAN 26

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

DAFTAR TABEL

Nomor	*Teks*	Halaman
1.	Nilai Investasi Malaysia di Indonesia	18
2.	Nilai Investasi Indonesia di Malaysia	19
3.	Neraca Perdagangan Indonesia – Malaysia (dalam jutaan UD dollar)	20
3.	Perkembangan Investasi Sektor Pertanian dan Industri Makanan Tahun 1996-2000 Yang Telah Disetujui BKPM	25

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

DAFTAR GAMBAR

Nomor	*Teks*	Halaman
1.	Perkembangan Produksi Serealia dan Umbi-umbian Negara Malaysia Tahun 1991-1998	13
2.	Perkembangan Luas Areal Tanaman Serealia dan Umbi-umbian Negara Malaysia Tahun 1991-1998	14

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

TIM PENYUSUN

Penasehat	:	Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri
Pengarah	:	Kepala Bagian Kerjasama Bilateral Kepala Bagian Kerjasama Regional
Penanggung Jawab	:	Ir. Metralinda Tunus, M.Sc./ Kepala Bagian Kerjasama Multilateral
Ketua Tim	:	Ir. Iwan Ridwan, MM.
Anggota	:	Drs. Djoko Supono, MM. Ir. Zulkifli Ali, M.Si. Ade Chandradijaya, S.TP., M.Sc. Henny Nurliani, S.Pi. Budi Supriyono Yayah Mardianah, SE. Ir. Juariah Budiarto Nunik Ernawatiningtyas Abidan Rajaguguk Ending

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

I. KEADAAN UMUM

1.1. Sejarah Singkat

Penduduk asli Malaysia dikenal dengan sebutan "Orang Asli" yang tinggal di Wilayah Semenanjung, "Orang Penan" di Serawak dan "Orang Rungus" di Sabah. Kehadiran mereka diperkirakan sejak 5000 tahun yang lalu. Para penghuni awal ini diperkirakan adalah para pendahulu yang berasal dari Cina dan Tibet yang bergerak ke selatan melalui daratan Asia Tenggara dan Semenanjung Melayu dan terus ke Indonesia. Kedatangan berikutnya ialah "Orang Melayu" yang mewakili gelombang kedua dan gelombang ketiga dari pergerakan ini. Orang Melayu pertama yang berdiam disini (Proto Melayu) diperkirakan mulai berdiam disini sejak 1000 tahun sebelum Masehi. Pergerakan ini diikuti oleh kelompok imigran lain yaitu Deutero Melayu pada abad-abad berikutnya.

Islam mulai masuk pada abad ke-13 dan setelah tahun 1400 Islam menjadi agama mayoritas. Tahun 1511 dimulailah abad penjajahan Eropa, ditandai dengan masuknya bangsa Portugis ke Malaka. Pada akhir abad ke-18 Inggris masuk ke Malaysia dan mulai menanamkan pengaruhnya di Pulau Pinang (1786), Singapura (1819) dan Melaka (1824) yang kemudian dikenal dengan "The Straits Settlements".

Tahun 1941 Jepang menyerang Malaya diikuti dengan menyerahnya Inggris di Singapura. Meskipun Inggris bisa memperoleh kembali kekuasaannya pada tahun 1945, namun Inggris menghadapi satu situasi politik yang sama sekali berbeda yang memaksa mereka membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan baru. Sebagai akibatnya, "The Straits Settlements" dibubarkan. Pada tanggal 21 Januari 1948 dibentuklah Federasi Malaya (Persekutuan Tanah Melayu) yang terdiri dari 11 negeri melalui "Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu" yang ditandatangani oleh 9 Raja Melayu

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

dan wakil pemerintah Inggris. Pihak Inggris telah menyatakan akan mempersiapkan kemerdekaan bagi Federasi Malaya. Aliansi yang terdiri dari UMNO, Malayan Chinese Association (MCA) dan Malayan Indian Congress (MIC) kemudian berhasil menekan Inggris untuk menyerahkan kekuasaannya pada tanggal 31 Agustus 1957 yang ditetapkan sebagai hari kemerdekaan Malaysia.

Pada tanggal 27 Mei 1961 Tunku Abdul Rahman dalam pidatonya di Singapura melontarkan pemikiran untuk membuat federasi yang lebih luas dan mencakup Federasi Malaya, Singapura dan negara-negara Kalimantan Utara, Sarawak serta Brunei. Pada tanggal 16 September 1963 terbentuklah Malaysia, tanpa Brunei yang menolak untuk bergabung. Pada tahun 1965, Singapura melepaskan diri dari Federasi Malaysia dan menjadi negara merdeka.

1.2. Politik dan Pemerintahan

a. Sistem Kepartaian

Masuknya orang-orang Cina dan India ke Tanah Melayu pada masa penjajahan Inggris banyak mempengaruhi tatanan politik di Malaysia. Mereka berusaha untuk tetap memelihara identitas etnis, bahasa dan budaya mereka melalui pendidikan, agama dan olahraga. Usaha-usaha itu telah menimbulkan akibat sampingan berupa semakin tajamnya jurang perbedaan antara mereka dan kaum Bumiputera.

Untuk memelihara suasana politik yang stabil maka diperlukan adanya kesatuan pandangan rakyat dalam kerjasama, toleransi dan pembagian kekuasaan politik. Keharmonisan kehidupan politik di Malaysia dilahirkan melalui kesepakatan partai-partai yang mewakili etnis untuk bergabung dalam Barisan Nasional yaitu koalisi partai-partai pemerintah yang didirikan pada tahun 1965. Partai-partai yang menjadi anggota Barisan Nasional antara lain adalah United Malaysian National Organization (UMNO) yang mewakili etnis Melayu, Malaysian Chinese

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Association (MCA) yang mewakili etnis Cina dan Malaysian Indian Congress (MIC) yang mewakili etnis India dan Partai Gerakan yang mewakili masyarakat multi etnis.

Selain itu juga terdapat partai oposisi, antara lain Partai Islam se-Malaysia (PAS) yang mewakili etnis Melayu Islam dan Democratic Action Party (DAP) sebagai partai multi etnis yang sebagian besar pemimpinnya berasal dari etnis Cina. Sementara itu di Sabah, Barisan Nasional terdiri dari 9 komponen yaitu UMNO, Partai Demokratik Sabah, Angkatan Keadilan Rakyat Bersatu, Partai Bersatu Rakyat Sabah, Liberal Democratic Party, Sabah Progressive Party, MIC, MCA dan Gerakan.

b. Sistem Parlemen

Semua undang-undang yang dibawa ke parlemen harus memperoleh persetujuan dari 3 komponen parlemen, yaitu :

a. Yang di-Pertuan Agong
b. Dewan Negara
c. Dewan Rakyat

Yang di-Pertuan Agong dalam mekanisme parlemen tidak menghadiri persidangan parlemen tetapi dapat menyampaikan pidato pengarahannya pada saat pembukaan masa sidang parlemen. Raja juga yang berwenang memanggil, memberhentikan atau membubarkan parlemen. Dalam menjalankan kewenangannya itu, Raja mendapat nasihat dari Jemaah Menteri (Kabinet).

Dewan Negara adalah Majelis Tinggi atau disebut juga dengan "Senate". Fungsi utama Dewan adalah membahas suatu rancangan undang-undang dengan lebih terinci daripada Dewan Rakyat. Dewan Negara tidak mempunyai kewenangan menolak, tetapi hanya menangguhkan suatu rancangan undang-undang untuk diajukan kepada Yang di-Pertuan Agong untuk memperoleh persetujuan.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Dewan Rakyat adalah suatu majelis yang memungkinkan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya melalui wakil-wakil mereka. Semua anggota Dewan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

c. Sistem Pemerintahan

Malaysia adalah negara dengan sistem Monarki Konstitusional yang dikepalai oleh seorang Kepala Negara yaitu Yang di-Pertuan Agong. Kepala Negara dibantu oleh Timbalan (Wakil) Yang di-Pertuan Agong yang dipilih dan diberhentikan oleh Majelis Raja-Raja. Kepala Negara dan wakilnya dipilih untuk masa 5 tahun. Kepala Negara menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata dan menjalankan tugasnya atas nasihat parlemen dan kabinet. Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri dibantu oleh Timbalan (Wakil) Perdana Menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Parlemen.

Federasi Malaysia terdiri dari 13 negara bagian yang masing-masing mempunyai bentuk dan pemerintahan sendiri (otonomi) yang terdiri dari 8 kesultanan, 1 kerajaan dan 4 propinsi. Selain itu masih terdapat 2 wilayah federal yaitu Kuala Lumpur dan Labian yang masing-masing dipimpin oleh seorang yang bergelar Datuk Bandar (setingkat gubernur di Indonesia) yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.

Adapun ke 13 negara bagian itu adalah :

Kesultanan	:	Johor, Kedah, Kelantan, Perak, Pahang, Negeri Sembilan, Terengganu dan Selangor. Tiap kesultanan dikepalai oleh seorang Sultan.
Kerajaan	:	Perlis, yang dikepalai oleh seorang yang bergelar Raja

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Propinsi : Pulau Pinang, Malaka, Sabah dan Serawak. Propinsi dikepalai oleh seorang yang bergelar Yang Dipertuan Negeri (setingkat Gubernur di Indonesia)

d. **Sistem Peradilan**

Kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 121 (1) Konstitusi Federal. Struktur kekuasaan kehakiman diatur sebagai berikut :

1. Mahkamah Persekutuan (Federal Court)
2. Mahkamah Rayuan (Court of Appeal)
3. Mahkamah Tinggi Malaya (High-Court of Malaya)
4. Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak (High Court of Sabah and Sarawak)
5. Mahkamah Sesyen (Session Court)
6. Mahkamah Majistret (Magistrates Courts) yang terbagi atas Majistret Kelas Pertama dan Majistret Kelas Dua (Magistrates Courts 1st and 2nd class)
7. Mahkamah Juvana (Junevile Courts)
8. Mahkamah Penghulu (Penghulu's Courts)

Kekuasaan tertinggi kehakiman di Malaysia dijalankan oleh Federal Court (setaraf dengan Mahkamah Agung di Indonesia). Dalam konstitusi Malaysia, badan-badan peradilan diberi kekuasaan yang luas terhadap badan legislatif dan eksekutif yang meliputi hal-hal :

- Menafsirkan konstitusi
- Menafsirkan hukum
- Dapat menyatakan hukum tertulis federal maupun negara bagian batal dan tidak berlaku
- Dapat menyatakan tindakan pemerintah sebagai melawan hukum

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

e. Konstitusi

Konstitusi Malaysia diambil dari Konstitusi Federasi Malaya yang disahkan pada Hari Kemerdekaan, tanggal 31 Agustus 1957. Konstitusi Federasi adalah hasil dari Komisi konstitusi yang terdiri dari ahli konstitusi yang berasal dari Australia, India dan Pakistan, yang diketuai oleh Lord Reid, seorang anggota Lord of Appeal, Inggris. Komisi Reid ini dibentuk sebagai hasil dari Perjanjian London (1956) antara pemerintah Inggris, Konperensi Raja-Raja dan wakil-wakil dari partai politik utama Malaya. Setelah pembicaraan rinci dimana ketiga partai politik utama waktu itu UMNO, MCA dan MIC memainkan peran penting dan memberikkan pengaruh yang besar, serta masyarakat umum diberikan kesempatan untuk memberikan sumbangannya, usulan-usulan Reid setelah diubah dan difinalisasikan akhirnya diterima oleh Dewan Legislatif Federal (Federal Legislative Council) dan diundangkan sebagai konstitusi baru negara. Ketika negara Malaysia terbentuk pada tanggal 16 September 1963, Konstitusi Federasi Malaysia itu tetap dipertahankan tetapi dengan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat menampung masuknya Sabah dan Serawak.

f. Kebijakan Politik Luar Negeri

Kebijaksanaan politik luar negeri Malaysia dalam sejarah dan perkembangannya sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor khusus, antara lain :

Pertama : Kemerdekaan Malaysia dicapai pada saat perlawanan terhadap komunisme sedang berlangsung sehingga kebijaksanaan politik luar negerinya adalah anti komunis dan condong ke "barat".

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Kedua : Kemerdekaan Malaysia dicapai tanpa perlawanan terhadap Inggris, sehingga secara moral Malaysia akan tetap mempertahankan hubungan baik dengan Inggris dalam bentuk keanggotannya dalam Commonwealth.

Ketiga : Identifikasi yang makin menonjol dalam kelompok negara-negara berkembang.

Keempat : Kesadaran Malaysia, bahwa dalam geostrategis kelompok ASEAN memegang peranan penting di Asia Tenggara.

Kelima : Ketergantungan Malaysia kepada perdagangan.

Keenam : Masyarakat yang multirasial.

Ketujuh : Islam sebagai agama negara.

Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa kebijakan politik luar negeri Malaysia dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas, meskipun prioritasnya akan sangat tergantung pada situasi yang dihadapi Malaysia pada suatu saat tertentu.

1.3. Sosial Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Malaysia dalam tahun 1996 mencapai 8,3% yang berarti menurun jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 1995 yang mencapai 9,6% dan merupakan pertumbuhan di atas 8% per tahun selama 8 tahun berturut-turut. Tingkat inflasi mengalami peningkatan dari 3,2% tahun 1995 menjadi 3,6% tahun 1996. Dalam tahun 1996 GNP Malaysia telah meningkat menjadi RM 237,8 milyar dibandingkan RM 66,8 milyar pada tahun 1986. Pertumbuhan tersebut terutama disebabkan meningkatnya

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

kontribusi sektor manufaktur terhadap GDP yang mencapai 34,2% . Ekspor yang berasal dari sektor manufaktur mencapai 80,6% dari total ekspor. Sektor lain yang menjadi penyumbang utama adalah pertanian, kehutanan, perikanan, perdagangan eceran, hotel, restoran, keuangan, asuransi, properti serta jasa.

Jika dibandingkan dengan tahun 1995, maka total nilai perdagangan Malaysia pada tahun 1996 meningkat sebesar 3,36% yaitu dari US$ 151,51 milyar menjadi US$ 156,59 milyar. Total nilai ekspor berbagai komoditas Malaysia pada tahun 1996 sebesar US$ 78,17 milyar dan apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya maka terdapat peningkatan sebesar 5,81%, nilai impor juga turut meningkat, namun peningkatan tersebut relatif lebih kecil dibanding dengan peningkatan ekspornya yaitu hanya sebesar 1,03% dengan nilai impor sebesar US$ 78,42 milyar.

Pertumbuhan ekonomi tersebut menyebabkan tersedianya lebih banyak lapangan pekerjaan dibandingkan dengan pertumbuhan tenaga kerja yang ada. Banyaknya peluang pekerjaan menyebabkan tingkat pengangguran turun menjadi 2,6% jika dibandingkan dengan tahun 1995 yang mencapai 2,8%.

Transaksi neraca berjalan tahun 1996 mengalami defisit sebesar RM 15.272 juta. Namun demikian, defisit transaksi neraca berjalan tersebut dapat ditutup dengan masuknya modal jangka panjang yang mencapai US$ 7,4 milyar. Sedangkan investasi asing pada periode tahun 1991 s/d Pebruari 1997 mencapai 51,4 % total investasi yang ada atau RM 87,4 milyar. Dalam tahun 1996, investasi asing meningkat sebesar 86% menjadi RM 17,1 milyar dibandingkan pada tahun 1995 sebesar RM 9,1 milyar.

Sementara itu investasi di luar negeri pada tahun 1996 telah meningkat mencapai RM 6,85 milyar atau tumbuh 53,4 % dari RM 1 milyar pada tahun 1995. Pada periode 5 bulan pertama tahun 1997, investasi Malaysia di luar negeri mencapai RM 3,56 milyar termasuk dalam bentuk "portofolio" dan "equity". Negara-negara utama yang

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

dijadikan tujuan investasi Malaysia pada tahun 1996 adalah Singapura, AS, Inggris, Hongkong dan Cina.

Nilai perdagangan internasional Malaysia pada bulan Mei 1997 mengalami surplus sebesar RM 156,8 juta dibandingkan defisit RM 2,12 milyar pada bulan April 1997. Hal tersebut terutama disebabkan meningkatnya pertumbuhan ekspor 10,4% dari RM 12,633 milyar pada bulan Pebruari dan menurunnya impor sebesar 3,7 % dari RM 17,759 milyar. Pada periode lima bulan pertama tahun 1997, Malaysia juga mengalami surplus perdagangan sebesar RM 49,1 juta dibandingkan defisit RM 1,37 milyar pada periode yang sama tahun 1996.

Pertumbuhan investasi swasta sebesar 6,4 % pada tahun 1996 yang diperkirakan akan meningkat menjadi 13,9 % pada tahun 1997. Sedangkan pertumbuhan investasi publik adalah 13%.

Menurut catatan Departemen Statistik Malaysia tanggal 15 Juli 1997, produksi karet alam Malaysia sampai bulan Mei 1997 meningkat 46,2% menjadi 76,648 ton dari 52.425 ton pada bulan April 1997. Namun selama periode Januari - Mei 1997 produksi karet menurun 10,2% menjadi 280,994 ton dari 424,054 ton pada periode yang sama tahun lalu. Ekspor karet alam pada bulan Mei 1997 meningkat 4% menjadi 81,077 ton dari 77,693 ton pada bulan April 1997. Namun ekspor karet keseluruhan selama periode Januari-Mei 1997 menurun 0,4% menjadi 384,894 ton dari 386,490 ton pada periode yang sama tahun 1996. Ekspor karet Malaysia terutama ke AS, Jerman, Cina, Italia, Inggris dan Belgia.

Indikator ekonomi pada tahun-tahun terakhir memberikan keyakinan kuat pada Malaysia dalam melaksanakan REPELITA ke VII sebagai wahana menuju pencapaian status negara maju seperti terkemas dalam Wawasan 2020. Perkembangan moneter selama sekitar bulan Agustus dan September 1997, krisis ekonomi yang melanda negara – negara di kawasan Asia Tenggara,

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

juga mengguncang Malaysia yang ditandai dengan melemahnya Ringgit dan turunnya harga saham Gabungan Bursa Kuala Lumpur.

Pemerintah Malaysia yang ditopang oleh basis ekonomi negara yang kuat, antara lain besarnya ekspor dan cadangan devisa, dan rendahnya inflasi dan pengangguran, mengambil langkah-langkah :

a. Konsultasi dengan pejabat moneter negara tetangga untuk bersama-sama menghadapi masalah ini.
b. Memperkecil "current account deficit" yang pada saat ini berkisar 5,2% GNP melalui :
   (1) Meningkatkan ekspor
   (2) Menunda beberapa proyek mega seperti proyek Bedungan Bakun, proyek Bandar Udara di kawasan utara dan proyek KLLC (Kuala Lumpur Linear City).
   (3) Membatasi pemakaian devisa, melalui :
      - Pembatasan impor
      - Menggalakkan wisata dan penggunaan produksi dalam negeri
      - Mengurangi perjalanan ke luar negeri
      - Menggalakkan penggunaan jasa-jasa dalam negeri

Dalam perkembangan terakhir, Ringgit Malaysia mulai stabil meskipun ada depresiasi sekitar 15%, harga saham gabungan menguat, tidak adanya lonjakan harga dan juga indikator pengangguran tidak memperlihatkan tanda-tanda merisaukan. Para pengambil keputusan dalam Sidang UMNO kembali meminta mereka yang tergabung dalam "Malaysia Incorporated" untuk bahu membahu mengantar Malaysia menjadi negara maju melalui pembangunan ekonomi.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

II. POTENSI NEGARA

2.1. Keadaan Geografis

Malaysia merupakan negara kerajaan federal di Asia Tenggara, yang terdiri dari bekas federasi Malaya di ujung selatan Semenanjung Malaka (kecuali Singapura), dan Sabah serta Serawak di bagian utara Pulau Kalimantan; berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan (utara), Laut Sulu dan Laut Sulawesi (timur), Kalimantan Indonesia dan Kepualau Riau (selatan), dan Selat Malaka (barat).

Negara Malaysia mempunyai luas wilayah sebesar : 330.442 km2. Satuan mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah adalah Ringgit atau Dollar Malaysia (M$). Jumlah penduduk Negara Malaysia mencapai 18.630.000 jiwa, dengan kepadatan penduduk 56 jiwa/km^2. Bahasa yang digunakan oleh penduduk Malaysia adalah bahasa Melayu.

Malaysia bagian barat didominasi oleh barisan pegunungan tengah yang diapit oleh dua dataran pantai yang sempit. Pegunungan ini terdiri dari beberapa barisan pegunungan. Beberapa puncaknya berketinggian lebih dari 2.000 m, yakni gunung Batu Puteh, gunung Chamah, dan gunung Korbu; puncak tertinggi adalah gunung Tahan (2.190 m), gunung yang paling tinggi di Semenanjung Malaka.

Malaysia Timur, didominasi oleh pegunungan, permukaan daratan Sabah dan Serawak sebgaian besar terletak di atas 1.000 m dari permukaan laut. Dataran tingginya mencakup lereng barat Pegungungan Kelingkang, Pegunungan Kapuas Atas, dan Pegunungan Iran di Kalimantan Tengah. Di Sabah, Pegunungan Croker (Tempayan), yang membujur ke arah timur laut sejajar dengan pantai, memuncak di Gunung Kinibalu (4.101 m), puncak tertinggi di seluruh Malaysia.

Sabah dan Sarawak memiliki dataran pantai yang sempit. Sungai utamanya adalah sungai Kinabatangan (550 km) di Sabah, serta Sungai Rajang (550 km) dan Sungai Baram (440 km) di Sarawak.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Malaysia memiliki iklim laut khatulistiwa dengan hujan yang lebat dan suhu yang senantiasa tinggi, serta dipengaruhi oleh pembalikan arah angin sesuai dengan musim. Oleh karena pengaruh kepulauan, suhu rata-rata di Malaysia Barat dan Timur dapat mencapai kira-kira 27° C dengan penggeseran kurang dari 2° C. Suhu ini jauh berkurang di daerah pegunungan. Tanah Tinggi Cameron (Malaysia Barat), yang mencapai ketinggian sekitar 1.450 m, memiliki suhu rata-rata sekitar 18° C, sama seperti di daerah-daerah pegunungan, misalnya di Melalap, Sabah, Malaysia Timur.

Variasi curah hujan jauh lebih besar. Meskipun hampir semua tempat menerima curah hujan 2.500-5.000 mm/tahun, besarnya tergantung pada ketinggian dan pada kemungkinan masing-masing untuk menerima pengaruh angin musim. Gunung Hijau di Negara Bagian Perak, daerah yang paling banyak menerima curah hujan, kerap kali menerima lebih dari 4.450 mm/tahun. Di Long Anak, daerah pedalaman Sarawak yang bergunung-gunung, curah hujan mencapai 5.000 mm/tahun. Sedangkan daerah-daerah bayangan hujan, seperti Kuala Klawang di daerah bayangan hujan dari Banjaran Besar (Malaysia Barat), jarang memiliki curah hujan lebih dari 1.500 mm/tahun.

Musim hujan berlangsung dari bulan Oktober sampai Maret, ketika angin musim timurlaut yang mengandung uap air melintasi Malaysia. Bagian-bagian yang terbuka di Semenanjung Malaka Timur, dan Sarawak Selatan menerima tidak kurang dari 500 mm curah hujan dalam bulan Januari, ketika angin musim berada pada puncaknya. Pengaruh angin musim baratdaya (dari bulan April sampai bulan September) menjadi berkurang karena terhalang oleh Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Sebagian besar wilayah Malaysia menerima 125-250 mm curah hujan setiap bulan selama musim ini. Malaysia Barat menerima curah hujan lebih sedikit daripada Malaysia Timur.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

2.2. Potensi Alam dan Pertanian

Malaysia termasuk negara yang sudah cukup makmur, dengan pendapatan per kapita termasuk yang tertinggi di kawasan Asia Tenggara, yaitu sebesar US$ 2.470. Meskipun demikian, masih banyak masalah ekonomi yang harus ditangani negeri ini.

Pertanian memegang peranan yang sangat penting di Malaysia, kendati tanah yang sudah dibudidayakan baru mencapai sebesar 15% dari seluruh wilayahnya. Sektor pertanian menyumbang sekitar 20% dari seluruh pendapatan ekspornya dan menyerap sekitar 30% dari tenaga kerjanya. Hasil pertanian yang utama adalah karet, padi, kelapa sawit, dan kayu. Padi, bahan pangan yang utama, menduduki peringkat ke dua setelah karet dalam hal luas lahan dan jumlah tenaga kerja yang diserap.

Perkembangan produksi dan luas area komoditas serealia dan umbi-umbian Malaysia tahun 1991 s/d 1998 dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.

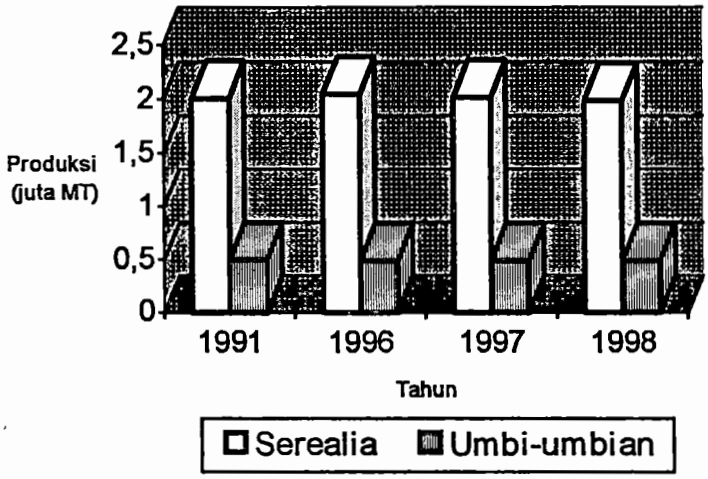

Gambar 1. Perkembangan Produksi Serealia dan Umbi-umbian Negara Malaysia tahun 1991-1998

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

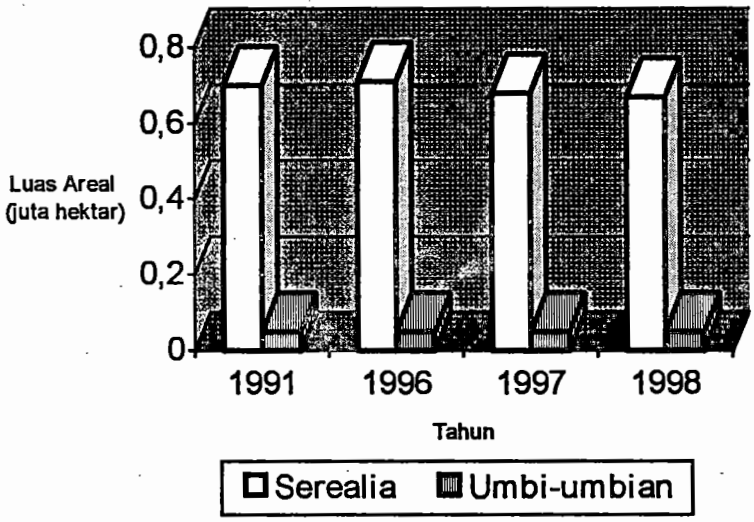

Gambar 2. Perkembangan Luas Areal Tanaman Serealia dan Umbi-umbian Negara Malaysia tahun 1991-1998

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

III. PERKEMBANGAN KERJASAMA

3.1. Kerjasama Bidang Politik

Pada dasarnya Malaysia tetap menganut garis politik bebas dan pragmatis. Kerjasama dengan negara-negara ASEAN tetap merupakan prioritas pelaksanaan hubungan luar negerinya. Namun dalam rangka mensukseskan rancangan pembangunan ke-7, Malaysia lebih berorientasi ekonomi (economic oriented) dalam hubungan luar negerinya terutama untuk memperluas kerjasama ekonomi/perdagangan, baik dengan negara maju maupun negara berkembang. Kunjungan PM Mahathir dan pejabat-pejabat tinggi Malaysia ke luar negeri dan sebaliknya kunjungan kepala-kepala pemerintahan asing ke Malaysia yang sangat tinggi frekuensinya terutama ditujukan untuk maksud tersebut.

Dengan motto "think south" Pemerintah PM Mahathir akhir-akhir ini gencar melakukan ofensif ke negara-negara berkembang Asia, Afrika dan Amerika Latin untuk memperkokoh Kerjasama Selatan-Selatan yang mandiri dan terlepas dari ketergantungan dengan negara-negara Barat/Utara. Sikap PM Mahathir yang menentang campur tangan negara-negara maju dalam urusan dalam negeri negara-negara berkembang berkesan keras. Namun demikian, hubungan dengan Jepang dan Cina yang merupakan mitra dagang utamanya di Asia tetap dipertahankan.

Sebagai negara anggota Non-Blok, Malaysia menjalankan politik luar negeri yang bebas dan Non-Aligned. Dalam kaitan ini, Malaysia melihat bahwa setelah berakhirnya kekuasaan bipolar di dunia, GNB dihadapkan pada struktur baru yang multipolar di mana muncul negara-negara yang mempunyai kekuatan di bidang politik dan ekonomi dan kekuatan-kekuatan tersebut bergabung dalam bentuk organisasi fungsionil seperti Kelompok 77 dan APEC. Jika

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

ditinjau, kekuatan-kekuatan tersebut mempunyai persamaan dengan sistim bipolar sebelum berakhirnya Perang Dingin karena masih dirasakan tekanan-tekanan terhadap negara-negara berkembang. Untuk itu GNB yang didirikan sebagai antitesis terhadap sistim bipolar harus mampu menghadapi tantangan regionalisasi dan globalisasi. Malaysia memandang peranan GNB di fora internasional sebagai Pelindung Kebebasan, Kemerdekaan dan Demokrasi Internasional, masih tetap relevan. Adanya permohonan negara-negara maju untuk bergabung dalam GNB baik sebagai anggota, observer maupun anggota kehormatan menunjukkan GNB masih diperlukan.

Prinsip-prinsip politik dan hubungan luar negeri kedua negara yang sama-sama menganut Garis Non Blok dan persamaan persepsi tentang perlunya stabilitas di kawasan Asia Tenggara bagi kesinambungan pembangunan nasional, menjadi landasan bagi kedua negara untuk mengembangkan hubungan yang erat, rasional dan saling menguntungkan.

Kedua negara telah bekerjasama dalam berbagai forum dalam menangani masalah-masalah regional maupun internasional yang menjadi kepentingan bersama. Malaysia selalu mendukung posisi Indonesia dalam masalah Timor Timur.

Untuk meningkatkan hubungan dan kerjasama antara kedua negara, pada tahun 1991 dibentuk Komisi Bersama Indonesia-Malaysia. Masalah-masalah yang dibahas dalam Komisi Bersama ini mencakup bidang politik, ekonomi, sosial serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Komisi Bersama Indonesia-Malaysia ini telah 6 kali mengadakan pertemuan, pertama diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 1991, kedua di Jakarta pada tahun 1993, ketiga diselenggarakan di Kuala Lumpur 1994, keempat di Jakarta pada tanggal 6-9 Juni 1995, pertemuan kelima di Penang, Malaysia, pada tanggal 18-20 Juni 1996, dan pertemuan keenam di Jakarta pada tanggal 12-14 Agustus 1997.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Dalam setiap sidang Komisi Bersama, kedua pemerintah telah sepakat mengenai perlunya penetapan batas ZEE di Selat Malaka. Dalam kaitan ini, pihak Malaysia berpandangan bahwa penetapan batas ZEE sebaiknya dibicarakan secara menyeluruh yakni meliputi semua perbatasan maritim kedua negara, namun pembicaraan tersebut hendaknya tidak mengganggu persetujuan yang telah ada diantara kedua negara, khususnya Continental Shelf Agreement.

Pada pertemuan ke-5 Komisi Bersama Indonesia-Malaysia (Joint commission/JCM) di Penang pada tanggal 18-20 Juni 1996, Indonesia mengulangi usulnya untuk menyelenggarakan konsultasi informal diantara para ahli kedua negara mengenai penetapan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan Landas Kontinen di Selat Malaka berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982. Malaysia beranggapan bahwa batas landas kontinen tersebut sama dengan batas ZEE karena lebar Selat Malaka kurang dari 400 mil, sehingga tidak layak jika ZEE berbeda dari batas landas kontinen.

Hingga saat ini kedua pihak belum mengadakan pertemuan guna membahas masalah ini secara khusus karena Malaysia berusaha mengulur-ngulur waktu perundingan. Belum adanya kesepakatan mengenai ZEE ini mengakibatkan banyak nelayan Indonesia yang ditangkap di Malaysia.

Dalam JCM ke-6 Indonesia telah mengingatkan pihak Malaysia tentang kesepakatan yang telah dicapai pada Pertemuan JCM ke-5 sebelumnya, yakni bahwa masalah ini harus segera diselesaikan. Untuk tujuan ini perlu diadakan pertemuan informal tingkat teknis batas ZEE di Selat Malaka yang hingga kini belum terlaksana. Pertemuan ke-6 Komisi Bersama RI-Malaysia sepakat bahwa pertemuan tingkat teknis akan diadakan dalam waktu dekat.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

3.2. Kerjasama Bidang Ekonomi

a. Investasi

Investasi Malaysia di Indonesia

Nilai Investasi Malaysia di Indonesia pada periode tahun 1967 sampai dengan 31 Mei 1997 adalah US$ 5,2 milyar yang meliputi 174 proyek dan terutama pada sektor perkebunan, kimia, kehutanan, tekstil, industri pengolahan kayu dan barang-barang logam, tanaman pangan dan pemrosesan makanan. Malaysia merupakan investor asing ke-2 terbesar di Indonesia. Investasi tersebut antara lain sebagai berikut :

Tabel 1 : Nilai Investasi Malaysia di Indonesia

Tahun	Jumlah Proyek	Nilai
1990	3	US$ 7.20 juta
1991	6	US$ 29.40 juta
1992	3	US$ 15.70 juta
1993	9	US$ 38.70 juta
1994	25	US$ 421.80 juta
1995	48	US$ 877.00 juta
1996	31	US$ 1.1 milyar

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal

Pada bulan Juli 1997 investasi Malaysia di Indonesia telah meliputi 181 proyek, dan seluruhnya berjumlah US$ 5,258.5 juta yang berarti meliputi 2,8% dari seluruh investasi negara-negara asing di Indonesia.

Investasi Indonesia di Malaysia

Nilai investasi Indonesia di Malaysia pada periode tahun 1990-1996 adalah US$ 1,191.2 juta yang meliputi 47 proyek. Investasi tersebut antara lain sebagai berikut :

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Tabel 2 : Nilai Investasi Indonesia di Malaysia

Tahun	Jumlah Proyek	Nilai
1990	12	US$ 401.8 juta
1991	8	US$ 456.10 juta
1992	4	US$ 183.90 juta
1993	4	US$ 96.20 juta
1994	0	US$ 0
1995	11	US$ 35.10 juta
1996	8	US$ 18.84 juta

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

b. Perdagangan

Neraca Perdagangan Indonesia-Malaysia

Pada periode bulan Januari-Nopember 1996, total nilai perdagangan bilateral antara Indonesia dan Malaysia sebesar US$ 2,4 milyar atau meningkat sebesar 20,78 % apabila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 1995 yang berjumlah US$ 2 milyar.

Berdasarkan data statistik dalam periode bulan Januari - Nopember 1996, total nilai ekspor Malaysia ke Indonesia terlihat meningkat sebesar 24.59% dibandingkan periode yang sama pada tahun 1995 dan peningkatan itu relatif lebih besar dibanding total nilai impor Malaysia dari Indonesia. Total nilai ekspor Malaysia ke Indonesia meningkat dari US$ 889,4 juta pada tahun 1995 menjadi US$ 1,1 milyar pada periode Januari - Nopember 1996. Sedangkan impor Malaysia dari Indonesia meningkat sebesar 17,74 % dari US$ 1,1 milyar pada periode Januari-Nopember 1995 menjadi US$ 1,3 milyar pada periode yang sama tahun 1996. Dengan demikian, pada periode Januari - Nopember 1996, Indonesia masih mengalami surplus sebesar US$ 200,6 juta pada neraca perdagangannya dengan Malaysia.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Selama lima tahun terakhir Indonesia menikmati surplus perdagangan dengan Malaysia. Pada tahun 2000 total perdagangan kedua negara mencapai US$ 3.100,3 juta, dengan surplus bagi Indonesia US$ 843,1 juta.

Mata dagangan ekspor utama Indonesia ke Malaysia adalah kertas dan kertas karton, ternak, daging kering digarai, susu dan produk susu, dan telur. Khusus untuk ekspor kertas dan kertas karton, mata dagangan ini cukup dapat bersaing di pasar Malaysia dengan kertas dan kertas karton dari Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Taiwan, dan Thailand. Sementara itu komoditas kokoa, kopi, produk-produk kayu, batubara, dan teh mempunyai pangsa pasar hampir 60% di Malaysia. Komoditas-komoditas tersebut sangat penting bagi Malaysia dan merupakan *life time import product*, karena ketergantungan terhadap komoditas ini cukup besar.

Impor utama Indonesia dari Malaysia diantaranya ternak, daging segar, daging kering, susu dan produk susu, dan mentega dan sejenisnya, mebel, sepatu, daging dan lemak/minyak hewani, peralatan komuniksi dan komponennnya, dan pupuk.

Tabel 3. Neraca Perdagangan Indonesia – Malaysia (dalam jutaan US dollar)

Tahun	Ekspor	Impor	Volume	Saldo
1995	986,5	766,9	1.753,4	+ 219,6
1996	1.109,7	823,7	1.933,4	+ 286,0
1997	1.357,2	864,8	2.222,0	+ 492,5
1998	424,2	260,3	684,5	+ 163,9
1999	1.335,9	605,6	1.941,5	+ 730,3
2000	1.971,7	1.128,6	3.100,3	+ 843,1

Sumber : Badan Pusat Statistik

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

3.3. Kerjasama Teknik

Dasar kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia dimulai sejak tanggal 24 Agustus 1985 dimana Departemen Pertanian melalui Komisi Bersama yang pada saat itu dipimpin oleh Departemen Luar Negeri RI telah mengusulkan pelaksanaan Sidang Working Group ke-1 pada tahun 1997.

Hal ini didasarkan pada usulan Direktur Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura, Ir. Amrin Kahar, pada waktu itu dengan suratnya Nomor KL.200.78, tanggal 4 Nopember 1996 menginformasikan pertemuan diadakan pada tahun 1997. Pihak Malaysia mengharapkan pertemuan diadakan di Jakarta. Sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda untuk dapat direalaisasikan.

Dalam rangka peningkatan kerjasama bilateral Indonesia-Malaysia di bidang pertanian, pada tanggal 18-20 Juni 1996 telah dilaksanakan "The Fifth Meeting of The Joint Commission for Bilateral Cooperation Between Indonesia-Malaysia", di Penang - Malaysia. Dalam pertemuan tersebut telah disepakati hal-hal sebagai berikut :

(1) Kedua belah pihak setuju untuk memperlakukan nelayan yang tertangkap dengan lebih baik.

(2) Pemerintah Malaysia menyarankan agar investasi dibidang perkebunan dapat diperpanjang lebih dari 30 tahun agar dapat menutup investasi yang dilakukan.

(3) Dalam pengembangan kelapa sawit di Indonesia agar Pemerintah Indonesia dapat mengizinkan upaya untuk mendatangkan bibit dari Malaysia.

(4) Pemerintah Malaysia mengulang kembali usulan agar Indonesia masuk menjadi anggota International Cocoa Organization (ICCO) dan Cocoa Producers Alliance (CPA). Usulan ini masih dalam pertimbangan Indonesia.

(5) Pemerintah Malaysia mohon informasi mengenai waktu dan tempat diselenggarakannya pertemuan "Working Group On Agriculture" tahun 1997.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

(6) Pemerintah Indonesia siap untuk melakukan pertukaran pengalaman dengan Malaysia dalam bidang Oyster Cultivation pengembangan udang berskala besar dan fish health management.

(7) Pemerintah Indonesia mengusulkan agar diadakan pertemuan para ahli untuk melakukan informal konsultasi mengenai batas laut ZEE, dimana hasil konsultasi ini bersifat tidak mengikat.

(8) (Namun rencana pertemuan di Ujung Pandang tidak dapat dilaksanakan/ditunda).

Usulan Kerjasama Bidang Pertanian RI-Malaysia

Pada tanggal 29 April 1998, Dep. Pertanian RI melalui Dit. Invesku, Dep. Luar Negeri telah menanggapi usulan pihak Malaysia berkaitan dengan kerjasama pertanian kedua negara, sebagai berikut :

(1) Pada dasamya pihak Indonesia dalam hal ini Dep. Pertanian setuju untuk meng-aktifkan kembali pertemuan Tingkat Menteri seperti usulan yang disampaikan pihak Malaysia.

(2) Kerangka Komisi Bersama yang telah diusulakn pihak Dep. Pertanian RI kepada Malaysia adalah "Working Group on Agriculture" (WGA) yang diketuai oleh Direktur Jenderal atau sederajat, dan pertemuan bisa dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun di Indonesia atau Malaysia.

(3) Dalam wadah WGA dapat dibentuk beberapa "Task Force" sesuai dengan kepentingan kedua belah pihak antara lain "Task Force on Food Crops and Horticulture", "Task Force on Livestock" dan "Task Force on Fisheries", dimana setiap "Task Force" diketuai oleh pejabat setingkat Direktur dan pertemuan dapat dilaksanakan sesuai dengan keperluan tiap-tiap "Task Force". Namun setiap kegiatan "Task Force" harus dilaporkan ke WGA.

Pertemuan ke-7 Komisi Bersama Indonesia-Malaysia

Pertemuan ke-7 Komisi Bersama Indonesia-Malaysia dilaksanakan pada tanggal 28-30 Agustus 2000 di Kuala Lumpur

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Malaysia, dan sesuai dengan MOU Komisi Bersama delegasi RI untuk pertemuan tingkat Menteri dipimpin oleh Menteri Luar Negeri, sedangkan delegasi RI untuk pertemuan Tingkat Pejabat Senior dipimpin oleh Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri.

Dalam pembahasan perkembangan kerjasama Bidang Pertanian, pertemuan telah menyepakati untuk menindaklanjuti kesepakatan yang dihasilkan pada forum JCM (Joint Commitee Meeting) ke-6, antara lain :

(1) Pentingnya meningkatkan kerjasama di sektor pertanian kedua negara dan akan dilakukan melalui "Kelompok Kerja" yang dapat menyelenggarakan pertemuan-pertemuan tingkat teknis.

(2) Pada perkembangan terkhir di era Pemerintahan Presiden KH. Abdurrahman Wahid, Departemen Pertanian yang menjadi koordinator untuk kerjasama bidang pertanian mengalami perubahan kelembagaan, antara lain dengan pindahnya Direktorat Jenderal Perikanan ke Departemen Eksploitasi Laut dan Perikanan.

(3) Hal tersebut menuntut adanya penyesuaian-penyesuaian yang cukup menyita waktu. Karena itu, tidak diperoleh masukkan mengenai perkembangan yang berarti mengenai implementasi hasil-hasil Pertemuan ke-6 Komisi Bersama Indonesia-Malaysia dalam kerjasama bidang pertanian.

Posisi Indonesia dan saran usulan :

1) Indonesia menyampaikan usulan agar rencana pembentukan *"Working Group on Agriculture Cooperation"* sebagaimana disepakati pada Pertemuan ke-6 Komisi Bersama dapat segera diwujudkan.

2) Indonesia mengharapkan agar *"Working Group"* tersebut dapat mulai melakukan pertemuan-pertemuan tingkat tekni

Training/Pelatihan dan Pertukaran Kunjungan.

Dalam rangka kerjasama teknik Indonesia-Malaysia, talah dilaksanakan pula pengiriman baik pejabat Kementrian Pertanian Malaysia ke Indonesia, maupun pejabat Departemen Pertanian ke Malaysia; antara

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

lain Pengiriman empat orang staf dari Institute Latihan Pengembangan Pertanian (ILPP)/Kementrian Pertanian Malaysia ke Indonesia dalam rangka mengikuti traning :

- "Models of Integrated Farming System Among Rice Growers and Fruit Growers".
- Benefits and Disadvantages of the Various Systems.
- Integration of Livestock (e.g. Poultry, Goat, Cattle) with fruit crops and vegetables.
- Integration of Livestock with crops and timber.
- Agrotourism Elements in the Integrated Farming System.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

IV. PELUANG KERJASAMA

Dalam membangun kerjasama bilateral, Indonesia diupayakan dapat memanfaatkan peluang kerjasama untuk menarik investasi bidang pertanian dari negara partner. Investasi asing di Indonesia dijamin dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 dan investasi sektor pertanian diatur dengan Keputusan Presiden No. 118 Tahun 2000.

Investasi asing sektor pertanian dan industri makanan yang telah disetujui Pemerintah Indonesia secara umum mengalami peningkatan dan berfluktuasi dari tahun 1996 s/d 2000. Besarnya perkembangan investasi yang telah disetujui BKPM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 : Perkembangan Investasi Sektor Pertanian dan Industri Makanan Tahun 1996-2000 Yang Telah Disetujui BKPM.

(US$ Million)

Tahun	Sektor Pertanian				Industri Makanan
	Tanaman Pangan	Peternakan	Perkebunan	Perikanan	
1996	52,2	86,0	1.168,1	79,8	691,4
1997	234,4	1,8	200,4	27,1	572,8
1998	224,4	15,4	725,4	33,0	342,0
1999	80,6	48,3	283,8	69,7	680,9
2000	311,3	18,4	59,1	49,5	701,0

Kerjasama bilateral bidang pertanian pada masa mendatang diharapkan dapat memanfaatkan peluang investasi asing di Indonesia, baik untuk tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Adapun jenis komoditas, bidang investasi dan lokasi yang dapat dipromosikan secara bilateral dalam menarik investasi asing tersebut dapat dilihat pada Tabel Lampiran 2.

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Tabel Lampiran 1. PROFILE NEGARA MALAYSIA

1.	Nama Resmi	:	Malaysia	
2.	Ibukota	:	Kuala Lumpur	
3.	Letak	:	Letek geografis Malaysia terbentang di posisi 0,5° dan 7° Luntang Utara dan 100°- 119,5° Bujur Timur. Negara ini berada dikawasan Laut Cina Selatan diantara Vietnam dan Indonesia	
4.	Perbatasan	:	Berdasarkan letak geografisnya, disebelah utara Malaysia berbatsan dengan Kerajaan Thailand, sedangkan disebelah selatannya berbatsan dengan wilayah Kalimantan, Republik Indonesia.	
5.	Wilayah	:	Luas wilayah seluruh Malaysia adalah 330.434 km^2 terdiri dari :	
			Wilayah Semenanjung	: 131.587 km^2
			Wilayah Serawak	: 124.449 km^2
			Wilayah Sabah	: 74.398 km^2
6.	Iklim	:	Khatulistiwa/ tropis berkisar antara 23-32°C	
7.	Pembegian Wilayah	:	Malaysia merupakan Kerajaan berbentuk Federasi dengan sisitem Pemerintahan Perwakilan. Federasi Malaysia terdiri dari 13 Negara Bagian yaitu 7 Kesultanan, 2 Kerajaan, dan 4 Propinsi, yang masing-masing mempunyai bentuk dan pemerintahan sendiri	
8.	Penduduk	:	Penduduk malaysia berjumlah 18.6 juta dengan komposisi : golongan Melayu/bumiputera 62%, golongan Cina 30%, golongan India 8%. Agama resmi/negara adalah islam. Agama lain, yaitu Budha (golongan Cina), Hindu (golongan India), dan Kristen	
9.	Bentuk Negara	:	Monarkhi Konstitusional	
10.	Hari Nasional	:	31 Agustus	
11.	Agama	:	Agama resmi/negara adalah Islam. Agama lain, yaitu Budha (golongan Cina), Hindu (golongan India), dan Kristen	
12.	Bahasa	:	Bahasa Melayu, bahasa lain adalah bahasa Cina dan Tamil	

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

13.	Ekonomi	:	Sumberdaya alam : Mata Uang : Ringgit GNP/GDP : Inflasi : Pendapatan /kapita :

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

Tabel Lampiran 2. Peluang Investasi Sektor Pertanian di Indonesia

Commodities	Fields of investment	Provinces
Food Crop		
1. Paddy/rice	- Production input - Seeding - Agric. Machinery service - Marketing - Rice Milling Unit - Processing (rice powder)	West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi, Lampung, North Sumatera, West Sumatera, South Sumatera, South Kalimantan, Bali, West Nusa Tenggara Barat.
2. Cassava	- Marketing - Processing (tapiokca, *pellet glucosa*, starch, sorbitol,spiritus,dextrin)	Lampung,North Sumatera, South Sumatera, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, South Sulawesi, East Nusa Tenggara
3. Corn	- Seedling - Marketing - Processing (maize, cooking oil, maizena, ethanol, maize powder, feed, *organic acid*)	West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi, Lampung, North Sumatera, East Nusa Tenggara, North Sulawesi
4. Soybean	- Seedling - Marketing - Processing (tempe, sauce, ketchup, powder, feed, cooking oil, nata de soy)	West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, south Sulawesi, Lampung, West Nusa Tenggara
5. Groundnut	- Seedling - Cultivation - Processing - Marketing	North Sumatera, South Sumatrera, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, Wets Nusa Tenggara, South Kalimantan, South Sulawesi
6. Mungbean	- Seedling - Cultivation - Processing - Marketing	North Sumatera, South Sumatrera, Lampung, West Java, Central Java, East Java, Wets Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, North Sulawesi, South Sulawesi

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

7. Sweet potato	- Seedling - Cultivation - Processing - Marketing	North Sumatera, West Sumatrera, Riau, Jambi, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, West Java, Central Java, East Java, Bali, East Nusa Tenggara, South Kalimantan, South East Sulawesi, South Sulawesi, Irian Jaya

Commodities	Fields of investment	Provinces
Horticulture		
1. Manggo	- Seedling - Cultivation - Processing (*canned juice, dried fruit, jam, jelly, pickle*) - Marketing	West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi, Bali, NTB, NTT, South Sumatera, North Sumatera, Lampung, Yogyakarta
2. Durian	- Seedling - Cultivation - Marketing	North sumatera, West Sumatrera, Riau, South Sumatera, Lampung, Bengkulu, West Java, Central Java, East Java, West Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan
3. Rambutan (hairy fruit)	- Seedling - Cultivation - Processing (*syrup, dried fruit, canned*) - Marketing	West Java, Central Java, East Java, North Sumatera, West Sumatera, Riau, jambi, South Sumatera, Lampung, Yogyakarta, Bali, South Kalimantan, Central Sulawesi
4. Mangosteen	- Seedling - Cultivation - Processing (*canned*) - Marketing	North Sumatera, West Java, Bali, South Sulawesi, West Sumatera, Riau, Central Java, East Java
5. Salacca (snake fruit)	- Cultivation - Processing (*syrup, dried fruit, canned*) - Marketing	Central Java, Yoyagakrta, East Java, North Sumatera, North Sulawesi, South Sulawesi, Bali, NTB, West Java, Irian Jaya
6. Orange	- Seedling - Cultivation - Processing - Marketing	North Sumatera, West Sumatera, Jambi, West Java, East Java, Bali, NTB, NTT, West Kalimantan

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

7. Banana	- Seedling - Processing (*Powder, chips, puree, jam, wine, syrup, nector, juice, jelly)* - Marketing	North Sumatera, West Sumatera, South Sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Java, NTB, NTT, Bali, South Sulawesi, Central Sulawesi, South-East Sulawesi, West Kalimantan
8. Potato	- Seedling - Cultivation - Processing (*chips, powder)* - Marketing	North Sumatera, West Sumatera, Jambi, South Sumatera, West Java, Central Java, East Java, South Sulawesi
9.Cabbage	- Cultivation - Marketing - Processing	North Sumatera, West Sumatera, Bengkulu, West Java, Central Java, East Java, Jambi, South Sumatera, Lampung, Bali, South Sulawesi, North Sulawesi
10. Chilli	- Seedling - Cultivation - Processing (*sauce, paste, powder, chilli oil, dried chilli),*	North Sumatera, Riau, West Sumatera, Bengkulu, South Sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Java, Yogyakarta, South Sulawesi, North Sulawesi, NTB, Bali
11. Shallot	- Processing - Marketing	North Sumatera, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, South Sulawesi, NTB, West Sumatera, Lampung
12. Carrot	- Cultivation - Processing - Marketing	North Sumatera, West Sumatera, Bengkulu, South Sumatera, West Java, Central Java, East Java, NTB, Bali, South Sulawesi
13. Tomato	- Seedling - Processing - Marketing	North Sumatera, West Sumatera, Bengkulu, South Sumatera, West Java, Central Java, East Java, NTB, Bali, South Sulawesi
14. Orchid and other ornamental plant	- Seedling - Cultivation - Processing (*oriental plant : parfume)* - Marketing	North Sumatera, Bengkulu, Jambi, West Java, West Kalimantan, East Kalimantan, Irain Jaya, Riau, North Sulawesi, Bali, Yogyakarta, Jakarta

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

15. Medicine plant	- Seedling - Cultivation - Processing (traditional medicine/jamu) - Marketing	North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, Lampung, Jakarta, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, Bali, West Kalimantan, East Kalimantan, North Sulawesi, South Sulawesi

Commodities	Fields of investment	Provinces
Livestock		
1. Cattle	- Breeding - Fattening - Processing (*corned beef,* sausage, leather industry) - Marketing	West Sumatera, Lampung, South Sumatera, Sulawesi, NTB, NTT
2. Dairy cow	- Breeding - Fattening - Processing (milk, milk sweet, cheese, *yoghut)* - Marketing	West Java, Central Java, East Java, Lampung
3. Poultry	- Breeding - Cultivation - Processing (*corned,* sausage) - Marketing	Java, Lampung, South Sulawesi, East Kalimantan
4. Goat	- Breeding - Fattening - Processing (milk, leather, sausage) - Marketing	Sumatera, Java, West Kalimantan
5. Pig	- Breeding - Fattening - Processing (sausage) - Marketing	West Kalimantan,Riau, Islands, North Sumatera, Iarain Jaya

Commodities	Fields of investment	Provinces
Estate		
1. Rubber	- Seedling - Processing (latex, dried rubber, *crumb rubber, slab)* - Marketing	North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, South Kalimantan, East Kalimantan, Central Sulawesi

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

2. Palm oil	- Seedling - Processing (CPO, *palm karnel, sludge)* - Marketing	North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, West Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan, Central Sulawesi, South Sulawesi, Irian Jaya
3. Coffe	- Seedling - Processing (powder, *cofee green,* instan coffe*)* - Marketing	North Sumatera, West Sumatera, Bengkulu, South Sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Java, Bali, NTB, NTT, West Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan, North Sulawesi, Central Sulawesi, South Sulawesi, South-east Sulawesi, Irian Jaya
4. Cacao	- Seedling - Processing (*cocoa, powder, cocoa cake, fat, shall, pilp)* - Marketing	North Sumatera, West Sumatera, Lampung, Bali, NTT, Bengkulu, West Java, Central Java, Yogyakarta, West Kalimantan, East Kalimantan, Central Sulawesi, South Sulawesi, South-east Sulawesi, Irian Jaya
5. Cashew nut	- Seedling - Processing (fried *cashew nut, shell liquid,* sweet) - Marketing	Central Java, Yogyakarta, East Java, Bali, NTB, NTT, North Sulawesi, Central Sulawesi, South Sulawesi, South-east Sulawesi, Irian Jaya
6. Coconut	- Seedling - Processing (cooking oil, coconut coal/arang, handy craft) - Marketing	North Sumatera, West Sumatera, Riau, Jambi, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, West Java, Central Java, Yogyakarta, East Java, Bali, NTB, NTT, West Kalimantan, Central Kalimantan, South Kalimantan, East Kalimantan, North Sulawesi, Central Sulawesi, South Sulawesi, South-east Sulawesi, Irian Jaya

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

7. Pepper	- Seedling - Processing (medicines, pepper powder, seasoning) - Marketing	South sumatera, Lampung, West Java, Central Java, East Kalimantan, West Kalimantan, South Kalimantan, Central Kalimantan, South Sulawesi, South-east Sulawesi

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAGIAN PROYEK PENINGKATAN KERJASAMA LUAR NEGERI
BIRO KERJASAMA LUAR NEGERI
DEPARTEMEN PERTANIAN
2001

PERPUSTAKAAN SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN